

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada saat ini membuat penggunaan sistem informasi akuntansi sangat diperlukan. Penerapan sistem informasi akuntansi sangat penting ketika dalam membuat suatu keputusan tentang alokasi sumber daya fisik dan elemen untuk mengubah data keuangan menjadi informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat mendukung operasi utama tidak hanya di sektor publik tapi juga di sektor swasta.

Sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak publik atau masyarakat. Sektor publik mencakup BUMN, BUMD, lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, LSM, Yayasan sosial maupun proyek – proyek yang bekerja sama dengan publik dan swasta. BUMD merupakan badan usaha yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan serta pembinaan pemerintah daerah (Pemda). Sebagian besar atau seluruh modal BUMD dimiliki atau dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Perda Nomor 23 Tahun 2014, BUMD adalah badan ekonomi yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi. Bentuk BUMD ada dua, yaitu: 1) Perusahaan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh suatu daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Daerah adalah

BUMD berbentuk perseroan terbatas, seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% dari modal dibagi menjadi saham. (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh suatu daerah. Berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ditetapkan batasan legal bagi BUMD adalah tidak adanya UUPT menggantikan UUPT No. 5 Tahun 1962.

Konsep pengelolaan BUMD (Perusahaan Daerah/Perusahaan Umum Daerah) non persero dimungkinkan dengan model pengelolaan BUMD dengan sistem “swakelola mandiri”. Dalam konsep manajemen ini, sistem kontrol atau pelatihan digunakan secara bertanggung jawab dan intensif. Pengelolaan BUMD dilakukan di bawah pengawasan dan pembinaan langsung dari para pemangku kepentingan yang dilakukan oleh direktur daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah negara sebagai pemegang izin dapat melakukan “intervensi politik” melalui badan pengawasan yang berhubungan positif dengan aktifitas BUMD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan salah satunya harus memasukkan unsur *good governance* ke dalam penyelenggaraan BUMD. Namun, belum ada peraturan pemerintah atau peraturan lain yang mengatur lebih lanjut tentang tata kelola BUMD yang baik. Konsep pengelolaan Persero BUMD (Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah) berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 1998 Tentang Badan Hukum BUMD menyatakan bahwa BUMD yang berbentuk perseroan terbatas tunduk pada UU No 40 Tahun 2007 berlaku bagi Badan Hukum BUMD perseroan terbatas dan anggaran dasarnya.

BUMD merupakan salah satu instrument pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian setiap daerah dan

perekonomian nasional. Setiap instansi pemerintah sudah difasilitasi menggunakan berbagai sistem yang didukung menggunakan kecanggihan teknologi buat menunjang kualitas kerja suatu instansi. Selain itu, pula pembinaan bagi pegawai diwajibkan menjadi standar kerja setiap instansi pemerintahan. Pemerintahan memberikan aturan biaya mengenai kegiatan operasional pada setiap instansi pemerintahan untuk dapat mendukung peningkatan kinerja. Hal itu dapat mendorong dengan semakin diperbaikinya sistem yang dipakai salah satunya sistem informasi akuntansi untuk penggajian.

Sistem informasi akuntansi adalah faktor utama yang menjadi penentu bagi seluruh keputusan yang akan diambil oleh pemimpin organisasi. Informasi dianggap sangat penting karena dapat menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian serta dapat membantu para pemimpin dalam mengambil suatu kesimpulan dan keputusan yang efektif maupun efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang memisahkan informasi akuntansi dan keuangan serta informasi lain yang dihasilkan dari proses rutin transaksi akuntansi (Dasaratha 2008 dalam Purwanty, 2019)

Salah satu informasi yang sangat penting bagi suatu instansi pemerintah adalah terkait kepegawaian yang berkaitan dengan pengisian informasi kepegawaian. Mulai dari pangkat atau golongan, jabatan, gaji. Informasi keuangan di suatu kantor mencakup banyak hal, antara lain informasi tentang gaji pegawai, yang juga disesuaikan dengan jabatan, masa kerja, kehadiran, pangkat atau golongan dan lain sebagainya. Hal tersebut tertuang dalam sistem terkait yang menghasilkan data kinerja berupa slip gaji yang disebut sistem informasi penggajian. Sistem akuntansi penggajian merupakan suatu fungsi, organisasi formulir, catatan, prosedur dan

sistem pengendalian intern yang dibentuk sedemikian rupa untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang nantinya berguna dalam pengawasan biaya tenaga kerja (Vita Rosita, 2018). Pada sistem akuntansi penggajian diperoleh fungsi - fungsi yang terkait dengan sistem dan prosedur penggajian, dokumen yang dipakai dalam sistem dan prosedur penggajian, catatan yang dipakai dalam sistem dan prosedur penggajian, dan jaringan prosedur yang dipakai dalam sistem dan prosedur penggajian (Intishar & Muanas, 2018).

Penggajian yaitu proses yang sangat penting untuk diperhatikan karena berhubungan langsung dengan kualitas kerja dari suatu perusahaan (Maharani, 2021). Penggajian merupakan masalah manajemen kepegawaian yang paling kompleks dan salah satu aspek terpenting, baik bagi karyawan maupun instansi terkait. Gaji adalah bagian dari imbalan – imbalan yang paling besar yang di berikan instansi sebagai bentuk balas jasa kepada karyawannya (Faishol, 2017). Gaji pokok non pegawai negeri sipil ditetapkan pada Upah Minimum Regional (UMR) Daerah yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sistem absensi instansi pemerintah mencatat kehadiran dan jam kerja pegawai. Perhitungan akumulasi jam kerja selanjutnya akan mempengaruhi gaji atau upah yang diterima oleh pegawai. Semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah harus digunakan dengan baik untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari penggunaan secara tidak terkendali. Penggunaan sistem absensi semakin berkembang dan menjalar keseluruh lapisan instansi pemerintahan tidak terkecuali juga pemerintahan di Bali. Pemerintahan kabupaten Buleleng sudah menerapkan absensi sidik jari, baik dari sektor publik maupun sektor swasta. Penggunaan

absensi sidik jari ini untuk mencegah adanya pegawai yang melakukan titip absen. Salah satu perusahaan daerah yang sudah menerapkan absensi sidik jari yaitu PD Pasar Argha Nayottama. Kegiatan operasionalnya yaitu menerima pendapatan operasional berupa cukai harian, sewa tanah, penerbitan hak pakai, parkir dan lain sebagainya. PD Pasar Argha Nayottama sendiri mengelola 14 pasar, namun ada 3 pasar yang berkontribusi terbesar dalam penerimaan restribusi pasar yaitu Pasar Seririt, Pasar Anyar, dan Pasar Banyuasri.

Tabel 1. 1 Jumlah Pasar di Kabupaten Buleleng

Nama pasar	Jumlah pegawai
Pasar Banyuasri	22
Pasar Anyar	16
Pasar Mumbul	5
Pasar Banjar	7
Pasar Buleleng	5
Pasar Kampung Bugis	2
Pasar Kampung Tinggi	4
Pasar Sukasada	1
Pasar Tamblang	1
Pasar Bungkulan	2
Pasar Seririt	27
Pasar DC Seririt	2
Pasar Latri	1
Pasar Kuliner Taman Kota	3
Jumlah	97

(Sumber : Perumda Pasar Argha Nayottama, 2023)

Jika manusia tidak mendukung sistem sebagai pelaksana, sistem tidak akan dapat bekerja secara efektif. Efisiensi implementasi sistem tidak dapat benar-benar terwujud hanya dengan satu komponen. Sistem hanya dapat bekerja jika didukung oleh pelaksana sistem yaitu pegawai. Setiap instansi membutuhkan manajemen operasional yang baik, didukung oleh staf yang berkualitas, agar dapat bekerja

secara efektif (Liusnardo, 2010). Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan (memiliki potensi untuk dimanfaatkan) untuk mencapai sesuatu kebutuhan manusia. Manusia disebut sumber daya karena manusia (tenaga, pikiran, waktu) dapat digunakan untuk mengimplementasikan manusia lain (untuk melaksanakan program kegiatan organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi). Sumber daya manusia atau karyawan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan karena karyawan dapat menyumbangkan tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk operasional perusahaan (Bakri, 2020). Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibangun atas dasar visi yang berbeda untuk kepentingan manusia dan dipimpin serta dikelola oleh manusia dalam menjalankan misinya.

Sumber daya manusia adalah bagian yang terpenting selain sumber daya lainnya dalam perusahaan. Salah satu penilaian terhadap kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pengalaman kerjanya (Dewi, 2020). Penempatan sumber daya manusia di wilayah kerja harus didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi masing-masing orang atau karyawan. Kualitas sumber daya manusia pada bidang penggajian merupakan faktor penting dalam keakuratan perhitungan gaji pegawai termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan mereka. Keberhasilan suatu penggajian tidak hanya dilakukan oleh pelaksana penggajian, tetapi juga penerima gaji itu sendiri. Pegawai sebagai penerima gaji harus disiplin dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

**Tabel 1. 2 Data Absensi Pegawai PD Pasar Kabupaten Buleleng
Periode April sampai Mei 2023**

Nama Pasar	Hadir	Sakit	Izin	Telat	Tanpa Keterangan
Pasar Banyuasri	19	-	-	3	-
Pasar Anyar	13	3	-	-	-
Pasar Mumbul	4	-	-	1	-
Pasar Banjar	7	-	-	-	-
Pasar Buleleng	5	-	-	-	-
Ps. Kampung Tinggi	2	-	-	-	-
Ps. Kampung Bugis	2	-	-	-	-
Pasar Sukasada	1	-	-	-	-
Pasar Tamblang	1	-	-	-	-
Pasar Bungkulan	2	-	-	-	-
Pasar Seririt	24	-	-	3	-
Pasar DC Seririt	2	-	-	-	-
Pasar Kuliner Taman Kota	3	-	-	-	-

(Sumber : Data diolah oleh penulis, 2023)

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, ditemukan fenomena pegawai telat dalam melakukan absensi jam pulang kerja pada salah satu unit PD Pasar di Kabupaten Buleleng. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua unit PD Pasar Buleleng yaitu Bapak I Made Sarjana sebagai berikut :
 “Masalah telat absen jam pulang kerja ini sudah saya singgung beberapa kali, namun beberapa pegawai nampak acuh akan teguran tersebut. Bahkan saya sudah memberikan saran untuk melakukan absen jam pulang kerja terlebih dahulu, lalu melanjutkan pekerjaannya atau bisa membawa alat e-scan untuk dibawa pulang”

Pada saat melakukan kegiatan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada bapak I Made Sarjana selaku kepala unit PD Pasar Banyuasri, didapatkan hasil bahwa terdapat fenomena seperti ada beberapa pegawai yang telat dalam melakukan absen jam pulang kerja. Sehingga hal ini menimbulkan ketidaksiplinnnya pegawai walaupun sudah diberikan peringatan, namun hal ini

masih tetap dilakukan yang berdampak pada pemanggilan ke pusat yaitu PD Pasar Argha Nayottama untuk menghadap kepada bapak direktur. Dengan tidak disiplinnya pegawai dalam melakukan absensi pas jam pulang kerja mengakibatkan pemotongan gaji, namun ada alasan dibalik terlambatnya para pegawai untuk melakukan kegiatan absensi pada jam pulang kerja. Alasan dari para pegawai telat dalam melakukan kegiatan absensi yaitu pekerjaan mereka yang berhubungan dengan sinyal, maksudnya para pegawai melakukan kegiatan scan kartu para pedagang yang sudah diisi saldo tersebut menggunakan alat scan yang bernama e-register. Para pegawai melakukan kegiatan scan ini mulai dari los lantai 1 basah sampai dengan los bunga, jika sinyalnya mendukung maka kegiatan scan ini tidak akan memakan waktu banyak. Namun jika sinyalnya mengalami gangguan, kegiatan scan ini akan memakan waktu banyak sehingga menyebabkan para pegawai tidak dapat tepat waktu dalam melakukan absensi di jam pulang kerja.

Selain melakukan wawancara dengan kepala unit, peneliti juga melakukan wawancara dengan pegawai yang telat dalam melakukan absensi beserta pegawai yang rajin dalam melakukan absensi. Menurut Komang Suka Arta selaku pegawai yang telat dalam melakukan absensi menjelaskan bahwa potongan yang dikenakan jika telat dalam melakukan absensi sebesar Rp 8.000 ribu untuk uang absensi. Selanjutnya menurut Dewa Gede Adi selaku pegawai yang rajin dalam melakukan absensi menjelaskan bahwa uang absensi sebesar Rp. 8.000 ribu diberikan setiap harinya, sehingga nantinya akan dikalkulasikan dengan jumlah kehadiran.

Menurut Komang Sumardika selaku pegawai divisi SDM menjelaskan bahwa semuanya sudah sesuai dengan mekanisme atau aturan yang ada. Seperti halnya jika terdapat pegawai yang telat melakukan absen akan dikenakan potongan sebesar

Rp. 8000 ribu yang nantinya akan diakumulasikan sesuai dengan berapa jumlah pegawai tersebut telat dalam melakukan absen. Akan tetapi jika pegawai selalu telat melakukan absen akan mendapatkan surat panggilan untuk menghadap ke dewan direksi.

Selanjutnya, Komang Sumardika juga menambahkan bahwa terdapat beberapa unit yang masih memakai sistem absensi secara manual, hal ini dikarenakan ada beberapa karyawan yang kurang dalam memahami teknologi sehingga berdampak dengan mudah untuk dapat melakukan manipulasi kehadiran. Selain itu, ada juga yang menggunakan sistem absensi manual dan *finger print* secara bersamaan namun terdapat karyawan yang melakukan absensi secara manual akan tetapi tidak melakukan absensi *finger print*. Selain itu, masih terdapat karyawan yang terlambat ke tempat kerja hal ini menandakan bahwa kedisiplinan karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional di perusahaan kurang.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggajian di lingkungan PD Pasar Kabupaten Buleleng. Dengan ini peneliti menarik judul penelitian “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Absensi Terhadap Keakuratan Penggajian Pada PD Pasar di Kabupaten Buleleng”

Kebaruan dari penelitian ini yaitu salah satu variabel yang diteliti pada penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, selanjutnya penelitian ini dilaksanakan di PD Pasar Kabupaten Buleleng yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian jumlah populasi dan sampel yang digunakan berbeda dari penelitian terdahulu, serta penambahan grand theory dan teknik dalam pengambilan sampel.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Fasilitas berupa alat absen elektronik yang diberikan pemerintah daerah tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai.
2. Masih terdapat ketidakdisiplinan pegawai dalam penggunaan alat tersebut.
3. Tidak disiplinnya para pegawai dalam melakukan kegiatan absensi mengakibatkan ketidakakuratan pencatatan data pada sistem informasi penggajian sehingga berakibat pemotongan gaji.
4. Alat pemotongan saldo yaitu e-register yang sangat lambat dalam melakukan kegiatan kerja

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa alat absensi elektronik tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai, masih terdapat pegawai yang tidak disiplin dalam menggunakan alat absensi tersebut. Ketidak disiplin pegawai dalam melakukan kegiatan absensi dapat mempengaruhi ketidakakuratan dalam pencatatan data pada sistem.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap keakuratan penggajian di PD Pasar Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keakuratan penggajian di PD Pasar Kabupaten Buleleng ?

3. Bagaimana pengaruh sistem absensi terhadap keakuratan penggajian di PD Pasar Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui :

1. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap keakuratan penggajian di PD Pasar Kabupaten Buleleng
2. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keakuratan penggajian di PD Pasar Kabupaten Buleleng
3. Pengaruh sistem absensi terhadap keakuratan penggajian di PD Pasar Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka penulis dapat memaparkan beberapa manfaat yang dapat diterima sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi keakuratan penggajian, serta dapat menjadi referensi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis

1.6.2 Manfaat Praktis

Peneliti dapat memberikan informasi kepada para pihak terkait, secara khusus bagi pemerintahan dan pegawai yang berkaitan langsung sebagai pelaksana proses penggajian.

- a) Bagi PD Pasar

Dengan adanya penelitian ini maka pemerintah dapat mengetahui pelaksanaan penggajian pada instansi pemerintah daerah khususnya pada PD Pasar Kabupaten Buleleng sehingga dapat merancang program dan menetapkan peraturan yang mendukung optimalisasi pelaksanaan penggajian. Selanjutnya terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan kualitas sumber daya manusia terhadap penggajian.

b) Bagi pegawai terkait

Bagi pegawai terkait, penelitian ini dapat menerangkan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat mempertahankan keakuratan penggajian dan mempertahankan pula keputusan kerja bagi pegawainya.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadikan sebagai rujukan, sumber serta informasi bagi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam faktor-faktor yang lainnya untuk dikembangkan dalam keakuratan penggajian.

